

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi mengenai Sekolah Van Deventer sebagai sekolah guru perempuan di Bandung (1918-1942).

1.1 Latar Belakang

Pendidikan secara umum memiliki arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan (Alfian dkk, 2019, hlm. 67). Pendidikan tidak akan ada habisnya atau berlangsung sepanjang hayat. Sehingga, menjadi orang yang terdidik itu penting. Mengingat pentingnya pendidikan, maka setiap orang memiliki hak untuk mengenyam pendidikan, baik berupa sekolah formal maupun keterampilan lainnya sebagai bekal hidup. Pendidikan seharusnya tidak melihat perbedaan status sosial, warna kulit, maupun jenis kelamin. Namun, dalam prosesnya hak tersebut tidak mudah untuk dimiliki, terutama bagi kaum perempuan pada era kolonial. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal dalam masyarakat, seperti adat dan kebiasaan, maupun faktor eksternal yakni akibat dari kebijakan pemerintah. Adapun pada era kolonial, keterbatasan akses pendidikan bagi kaum perempuan dipengaruhi oleh adanya ketimpangan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam hal pendidikan bagi kaum bumiputera, serta budaya Jawa yang mengikat kaum perempuan. Hal tersebut memunculkan ketidakpuasan dan empati terhadap ketidakadilan, perbedaan sosial di masyarakat, serta sikap sensitif gender dalam bidang pendidikan.

Budaya di Pulau Jawa dikenal sangat kuat dengan adat istiadat lama yang feodal, dan membuat perempuan tidak mendapat kebebasan dan pendidikan, dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan kondisi tersebut dialami baik dari perempuan golongan bangsawan maupun golongan rendah. Adat istiadat lama mendeskripsikan tugas perempuan hanya bertumpu kepada tiga hal, yakni: manak (melahirkan), masak (memasak), dan macak (berdandan) (Hapsari, 2017, hlm. 73).

Tidak adanya sekolah khusus perempuan hingga akhir abad ke-19 pada dasarnya tidak lain merujuk kepada adat istiadat lama yang feodal tersebut. Hal tersebut dikisahkan dalam surat Kartini kepada Estelle H. Zeehandelaar, seorang gadis Belanda yang menjadi temannya, mengisahkan bahwa:

“Kami gadis-gadis masih terikat oleh adat istiadat lama dan sedikit sekali memperoleh kebahagiaan dari kemajuan pengajaran. Untuk keluar rumah sehari-hari dan mendapat pelajaran di sekolah saja sudah dianggap melanggar adat. Ketahuilah, bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya berusia dua belas tahun, saya dikurung di dalam rumah, saya mesti masuk “kurungan”. Saya dikurung di dalam rumah, seorang diri, sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh keluar dunia itu lagi bila tidak disertai seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi saya, dipilih oleh orang tua saya untuk saya, dikawinkan dengan saya tanpa sepengetahuan saya sendiri” (Sutrisno, 1985, hlm. 2-3).

Kutipan surat tersebut jelas memperlihatkan bagaimana adat istiadat lama berjalan kepada perempuan di Pulau Jawa. Budaya tersebut mengikat mulai dari perilaku, pendidikan, hingga masa depan perempuan di Pulau Jawa. Selain itu, di daerah Pasundan pun serupa, di mana seorang guru perempuan Belanda yang datang ke Pasundan pada tahun 1913, menulis tentang perempuan Sunda, bahwa ketika ia mulai bekerja di Pasundan, hampir tidak ada atau sedikit sekali gadis-gadis yang pergi ke sekolah (Poesponegoro&Notosusanto, 2010, hlm. 264). Keadaan tersebut membuat perempuan melakukan upaya perubahan, di mana perubahan tersebut dilakukan oleh perempuan elit, salah satunya Kartini, yang mulai membuka pengajaran bagi perempuan di Jepara dan Dewi Sartika di Jawa Barat.

Diberlakukannya Politik Etis pada awal abad ke-20 menjadi momentum yang tepat dalam rangka perbaikan sistem pendidikan bagi bumiputra agar lebih baik. Politik Etis merupakan usaha untuk mengangkat derajat kehidupan bangsa Indonesia sebagai balas jasa. Politik Etis adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Adapun Poesponegoro & Notosusanto (2010, hlm. 22) mendefinisikan Politik Etis sebagai politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, serta efisiensi. Politik Etis di Indonesia muncul karena dipengaruhi oleh para tokoh Belanda, di antaranya adalah van Kol, Conrad Theodore van Deventer, dan P. Brooschooft. Van Kol yang mewakili golongan sosialis, dengan ditunjang oleh pengalamannya di Indonesia, mengkritik keadaan

yang serba merosot di Indonesia. Senada dengan pernyataan van Kol, Brooschoft beranggapan bahwa selama satu abad lebih pemerintah kolonial telah mengambil keuntungan dari rakyat tanpa mengembalikan sepeser pun.

Pada dasarnya, kritikan dari kedua tokoh tersebut merujuk kepada munculnya partai liberal di Belanda akibat berkembangnya paham liberalisme era *Aufklärung* pada abad ke-18 yang telah mendominasi kehidupan ketatanegaraan dan politik praktis di Belanda pada pertengahan abad ke-19 hingga dasawarsa abad ke-20, perekonomian liberal yang meluas, administrasi yang makin mencakup, serta berdampak kepada merosotnya kesejahteraan dari bumiputera itu sendiri. Politik liberal mengedepankan prinsip kebebasan terutama untuk memberi kesempatan bagi pengusaha memakai tanah rakyat dan segala peraturan dibuat untuk melindungi para pengusaha Belanda itu sendiri, antara lain dalam hal memiliki atau menyewa tanah, undang-undang perburuhan, serta undang-undang pertambangan (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, hlm. 22).

Politik liberal yang diterapkan kolonial Belanda berdampak pada kondisi sosial rakyat bumiputera. Banyak dari mereka yang kehilangan tanahnya hingga mengalami demoralisasi dan timbul disorganisasi masyarakatnya. Van Deventer, selaku pemimpin liberal sendiri mendukung adanya ide politik kolonial baru. Prinsip liberal seperti yang telah digambarkan di atas tidak disetujui oleh van Deventer. Hal tersebut dikarenakan ia lebih mengutamakan kesejahteraan materiil dan moril kaum bumiputera, desentralisasi pemerintahan, serta penggunaan tenaga bumiputera dalam administrasi. Kedudukan van Deventer sebagai pemimpin kaum liberal tersebut membuat perannya berpengaruh besar terlebih karena karangannya yang berjudul "*Een Eereschuld*" atau "Utang Kehormatan" pada tahun 1899, yang mana dalam karangannya tersebut, ia mengecam politik keuangan Belanda yang tidak memisahkan keuangan negara induk dari negeri jajahan (Wismulyani, 2018, hlm. 14). Menurutnya, uang tersebut perlu dikembalikan karena itu merupakan utang kehormatan. Van Deventer pun mengatakan bahwasanya Belanda telah maju dan disegani di dunia Eropa. Oleh karena itu, dirasa bahwa Belanda tidak boleh begitu saja melupakan jasa dari penduduk di wilayah jajahannya, yaitu Indonesia atau Hindia Belanda kala itu.

Realisasi dari adanya perubahan politik kolonial baru pasca munculnya berbagai kritikan dari para tokoh Belanda tersebut dipercepat oleh terjadinya krisis ekonomi akibat kerugian dari sektor perkebunan yang terserang hama maupun ternak yang terserang wabah penyakit. Situasi ini mendesak untuk ditemukannya beberapa opsi solusi. Salah satu dari opsi tersebut adalah menggunakan pertimbangan dari karangan van Deventer dengan menerapkan politik “kewajiban moral” atau Politik Etis. Politik Etis secara resmi mulai dilaksanakan pada tahun 1901. Adapun program dari Politik Etis tersebut, antara lain: membangun irigasi di berbagai daerah pertanian/perkebunan, menyelenggarakan emigrasi di daerah yang telah dirasa padat, serta memberikan pendidikan bagi bumiputra. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi Barat. Pemerintah Belanda mendasarkan kebijakannya pada pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputera. Bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Khusus bagi penduduk bumiputera, ditentukan agar di tiap kabupaten didirikan sekolah para remaja bumiputera. Di Hindia Belanda, dibentuk suatu departemen tersendiri yang mengurus masalah pendidikan, agama, dan kerajinan yang disebut dengan *Department Van Onderwijs En Eeredients* (Departemen Pengajaran dan Kepentingan Kehormatan). Departemen ini dibentuk agar penduduk bumiputera, Cina dan golongan lainnya juga memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan Barat sebagai dasar pendidikan.

Berlangsungnya Politik Etis di atas sekaligus menjadi salah satu yang melatarbelakangi perkembangan pendidikan bagi perempuan. Di mana setelah Kartini wafat dan surat-suratnya diterbitkan dalam sebuah buku oleh J.H. Abendanon selaku Kepala Dinas Pendidikan di Hindia Belanda pada 1911 dalam buku “*Door Duisternist Tot Licht*” (Habis Gelap Terbitlah Terang), van Deventer bersama istrinya, ternyata menyukai buku tersebut dan bersimpati terhadap kehidupan perempuan di Pulau Jawa. Sebagai tindak lanjut dari bentuk

perhatiannya tersebut, mereka bersama tokoh elit Belanda lainnya berinisiatif mendirikan Yayasan Kartini pada 1912.

Yayasan Kartini merupakan yayasan pendidikan perempuan bumiputera yang diresmikan oleh Ratu Belanda dengan menunjuk Abendanon untuk mengatur pendiriannya. Sebelum yayasan berdiri, terlebih dahulu dibentuk sebuah komite yang anggotanya terdiri dari A. Baronesse van Hogendrops Jacob, J.H. Abendanon dan istri, C. Th. van Deventer dan istri, Kessles de Lange, D. von Schmidt auf Altstadt, J.C.F. de Graeff, E. van Look, H.V. Baron Bentinck, dan D. Hannema. Dalam Yayasan Kartini, van Deventer ditunjuk sebagai pimpinan yayasan. Yayasan Kartini menjadi yayasan sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan khusus perempuan, yang bertujuan mendirikan Sekolah-sekolah Kartini, atau sekolah perempuan pada 1913. Sekolah ini khusus hanya menerima siswa perempuan di Pulau Jawa. Adapun alasan van Deventer memutuskan untuk mendirikan Yayasan Kartini tersebut, selain karena simpatinya terhadap pendidikan perempuan di Pulau Jawa pasca membaca surat-surat Kartini, tidak lain juga dilatarbelakangi karena adanya ketimpangan antara jumlah rakyat yang ingin bersekolah dengan jumlah sekolah yang tersedia pasca Politik Etis. Keadaan tersebut mendorong para kaum elit untuk mendirikan sekolah sendiri dengan meniru metode dan sistem pengajaran Barat serta berlandaskan cita-cita nasional (Hapsari, 2017, hlm. 75).

Tak berselang lama, pada 27 September 1915 van Deventer meninggal dunia karena sakit di usianya yang dua hari kemudian akan menginjak lima puluh delapan tahun. Untuk penghormatan atas jasanya dalam upaya memajukan pendidikan perempuan Jawa, muncul inisiatif untuk mendirikan Yayasan *Van Deventer* atau *Van Deventer Vereeniging*, serta Sekolah Van Deventer pada 1917, sebagai sekolah lanjutan bagi para siswa lulusan Sekolah Kartini, dengan corak sekolah guru atau *kweekschool*, yang sebenarnya masih berada dalam naungan Yayasan Kartini sebagai induknya. Sekolah Van Deventer ini tersebar di seluruh bagian di Pulau Jawa, dengan diwakili oleh empat daerah, yakni Semarang, Batavia, Bandung, Solo, dan Malang. Adanya sekolah perempuan ini tentunya membawa angin dan babak baru bagi perkembangan pendidikan perempuan di Pulau Jawa. Hal tersebut

mendorong atau setidaknya memungkinkan perempuan memperoleh pendidikan serta keterampilan yang lebih baik dan berguna bagi kehidupannya ke depan.

Kondisi perempuan pada masa kolonial yang terbelakang baik dalam kehidupan sosial maupun pendidikan memunculkan rasa empati gender dari penulis selaku kaum perempuan masa kini. Penulis yang pada masa kini dapat mengenyam pendidikan seluas-luasnya merasa bersyukur, sekaligus kagum akan perjuangan dan semangat kaum perempuan terdahulu untuk mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki ditengah budaya patriarki yang kuat pada masa itu. Yang mana dalam hal ini proses perjuangan akan perubahan nasib perempuan tersebut dibantu atau setidaknya difasilitasi oleh Yayasan *Van Deventer* melalui Sekolah Van Deventer di Bandung yang memang mengkhususkan sekolah bagi kaum perempuan. Sehingga sebagai mahasiswa pendidikan sejarah pada Universitas Pendidikan Indonesia yang juga terletak di Bandung, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejarah dari kaum perempuan masa itu, terutama dalam bidang pendidikan yang ada di Bandung. Terlebih hingga saat ini, sejauh penelusuran penulis terhadap buku-buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, belum banyak kajian atau penelitian tentang kaum perempuan – tidak sebanyak penelitian tentang kaum laki-laki. Dari hal tersebut, penulis menemukan adanya urgensi penelitian dan penulisan terkait sejarah kaum perempuan.

Penelitian ini tentunya bermaksud untuk menambah wawasan khalayak umum terkait bagaimana keadaan serta perjuangan kaum perempuan masa kolonialisme. Selain itu, penulisan tentang sejarah perempuan juga bermanfaat untuk para generasi muda terkhusus para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI dalam memahami bagaimana kehidupan masa kolonialisme Belanda yang kebijakan-kebijakannya berdampak kepada kaum perempuan, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun pendidikan. Sebagai generasi muda, mereka perlu mengetahui bagaimana perjuangan para terdahulunya dalam memperjuangkan hak-hak mereka dari para penjajah secara mendalam. Hingga nantinya mereka dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut untuk lebih bersyukur karena di masa kini dapat mengenyam pendidikan seluas-luasnya, serta semangat dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pengetahuan dan pemahaman tersebut

nantinya akan sangat membantu mereka dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk topik Dampak Penjajahan Bangsa Eropa bagi Bangsa Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat situasi dan kondisi tersebut ke dalam penulisan yang berjudul “**Sekolah Van Deventer: Sekolah Guru Perempuan di Bandung (1918-1942)**”. Maksud dari topik penulisan ini yakni untuk mengetahui bagaimana peranan Sekolah Van Deventer yang ada di Bandung membantu kaum perempuan untuk dapat mengenyam pendidikan dan mendapatkan manfaat dari Sekolah Van Deventer itu sendiri untuk kehidupannya mendatang. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan generasi bangsa sekaligus sebagai saluran mobilitas sosial vertikal di masyarakat. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin terbukanya pula kesempatan untuk terjadinya mobilitas sosial.

Untuk periodisasi, penulis mengambil rentang tahun 1918-1942 karena pada tahun 1918 merupakan awal berdirinya Sekolah Van Deventer di Bandung, sedangkan tahun 1942 merupakan akhir periode pendudukan kolonial Belanda di Indonesia, yang mana sekaligus mengakhiri berdirinya Sekolah Van Deventer tersebut. Sekolah-sekolah perempuan seperti Sekolah Van Deventer ini sangat penting perannya dalam perubahan sosial kehidupan perempuan di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam perkembangan Sekolah Van Deventer. Adapun pemilihan kota Bandung sebagai fokus kajiannya, selain karena latar belakang penulis yang tengah menempuh pendidikan di Bandung, juga dikarenakan Sekolah Van Deventer di Bandung ini lah yang menjadi satu-satunya cabang dari Sekolah Van Deventer milik Yayasan *Van Deventer* yang masih diwariskan atau diturunkan dan beroperasi hingga saat ini, meskipun terdapat beberapa pergantian sebagai penyesuaian zaman.

Sekolah bekas Sekolah Van Deventer di Bandung tersebut kini bernama Balai Perguruan Putri (BPP), yang terletak di Jalan Van Deventer No. 14. Di Sekolah BPP terdapat tiga tingkatan, yakni Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebelum berubah menjadi Balai Perguruan Putri, dalam perjalanan sejarahnya, mulai pada masa

pendudukan Jepang, sekolah berubah menjadi markas tentara. Adapun muridnya diungsikan ke Sekolah Guru yang ada di Yogyakarta untuk mencegah terjadinya pemerkosaan yang marak dilakukan tentara Jepang kepada kaum perempuan dan Sekolah Van Deventer harus dipindahkan ke Belanda. Kemudian, setelah berakhirnya pendudukan Jepang, bangunan tersebut pernah digunakan Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Sekolah Tinggi Olahraga (STO).

Hingga pada tahun 1952, perwakilan Belanda dari *Van Deventer voor West Java*, bernama Tuan Veldkamp datang ke Bandung untuk menyerahkan *Van Deventer Vereeniging voor West Java* beserta Sekolah Van Deventer, termasuk semua kekayaannya berupa uang di Giro Bank Export Import, bangunan-bangunan sekolah dan tanahnya seluar 1,6 ha di kompleks Jl. Van Deventer No. 14 Bandung kepada sejumlah alumni dan tokoh pendidikan di Jawa Barat. Adapun perwakilan yang mendapat kepercayaan pada masa itu adalah Ibu Roemsari yang diangkat sebagai ketua dan Ibu E. Purwoadikusumo sebagai sekretaris. Ibu Roemsari sendiri merupakan alumni sekaligus guru di Sekolah Van Deventer. Segala kekayaan disertai surat-surat otentik diserahkan mutlak kepada pengurus bangsa Indonesia. Atas usaha Ibu Roemsari dan Ibu Purwahadikusumo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari bahasa Belanda disalin ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan alam kemerdekaan. Hingga pada akhirnya sekolah tersebut pun turut berganti nama menjadi Balai Perguruan Putri (BPP) pada tahun 1953. Dengan surat No. J. A. 5/54/9 tanggal 26 Juni 1953, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Menteri Kehakiman. Dengan mengetahui hal tersebut, penulis berharap bahwa kajian ini menjadi salah satu pelengkap penulisan mengenai pelaksanaan Politik Etis sebagai dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan maupun mengenai keadaan pendidikan kaum perempuan itu sendiri di era kolonialisme, dan dijadikan sebagai pembelajaran mengenai urgensi pendidikan dalam kemajuan suatu generasi bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, adapun permasalahan pokok yang akan penulis kaji yaitu “Bagaimana sejarah Sekolah Van Deventer sebagai sekolah guru perempuan di Bandung tahun 1918-1942?”. Untuk lebih

mengarahkannya dalam pembahasan masalah, penulis akan merumuskannya sebagai berikut:

1. Apa landasan pemikiran pendirian Sekolah Van Deventer di Bandung tahun 1918?
2. Bagaimana peranan Sekolah Van Deventer di Bandung dalam penguatan pendidikan kaum perempuan tahun 1918-1942?
3. Bagaimana dampak Sekolah Van Deventer di Bandung terhadap pendidikan perempuan tahun 1922-1942?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dicapai. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai sejarah Sekolah Van Deventer sebagai sekolah guru perempuan di Bandung tahun 1918-1942. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini di antaranya:

1. Menjelaskan landasan pemikiran pendirian Sekolah Van Deventer di Bandung tahun 1918.
2. Mendeskripsikan peranan Sekolah Van Deventer di Bandung dalam penguatan pendidikan kaum perempuan tahun 1918-1942.
3. Menjelaskan dampak Sekolah Van Deventer di Bandung terhadap pendidikan perempuan tahun 1922-1942.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sejarah Sekolah Van Deventer sebagai sekolah guru perempuan di Bandung tahun 1918-1942. Sedangkan, secara praktis penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis di antaranya:

1. Memperkaya penulisan sejarah Indonesia masa kolonial.
2. Menambah wawasan mengenai perkembangan pendidikan perempuan di Pulau Jawa, khususnya Bandung masa kolonial.

3. Mengetahui dan memahami perkembangan pendidikan perempuan di Bandung tahun 1918-1942.
4. Menambah referensi belajar peserta didik SMA untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XI mengenai topik Dampak Penjajahan Bangsa Eropa bagi Bangsa Indonesia K.D 3.3 Menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan Panduan Penulisan Karya Ilmiah UPI 2021, struktur organisasi yang akan dijelaskan dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bab, di antaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memaparkan mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Pada bagian ini pula penulis akan memberikan alasan mengapa penulis melakukan penulisan mengenai “Sekolah Van Deventer: Sekolah Guru Perempuan di Bandung (1918-1942)”. Selain itu, bab ini terdiri dari rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan yang tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji pembahasan penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, menjelaskan mengenai beberapa sumber yang dipakai penulis dalam mengkaji topik. Kemudian, akan dijelaskan beberapa konsep dari dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi berkaitan dengan masalah yang dikaji. Dijelaskan pula penelitian terdahulu dari berbagai sumber yang akan penulis gunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menjadi kerangka berpikir penulis dalam Bab IV untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian, membahas mengenai metode dan teknik penulisan yang akan penulis gunakan dalam melakukan penulisan mengenai “Sekolah Van Deventer: Sekolah Guru Perempuan di Bandung (1918-1942)”. Penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, memaparkan mengenai rumusan masalah yang ada dalam Bab I secara deskriptif untuk membahas pertanyaan secara mendalam. Pembahasan dimulai dari menjelaskan landasan pemikiran pendirian Sekolah Van Deventer di Bandung tahun 1918. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan menjelaskan peranan dari Sekolah Van Deventer di Bandung dalam penguatan pendidikan kaum perempuan tahun 1918-1942. Terakhir, akan dibahas dampak Sekolah Van Deventer di Bandung terhadap pendidikan perempuan tahun 1922-1942. Pemaparan tersebut berdasarkan analisis penulis terhadap kajian yang telah dikritik sebelumnya.

Bab V Simpulan Implikasi dan Rekomendasi, merupakan kesimpulan dari analisis penulis secara keseluruhan terhadap penulisan yang telah dilaksanakan. Hasil temuan ini merupakan interpretasi penulis mengenai pembahasan secara singkat. Penulis pun menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan merekomendasikan kepada berbagai pihak untuk mengembangkan hasil penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.